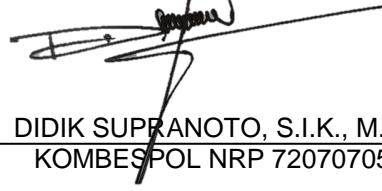




KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT
SUBBID PENMAS

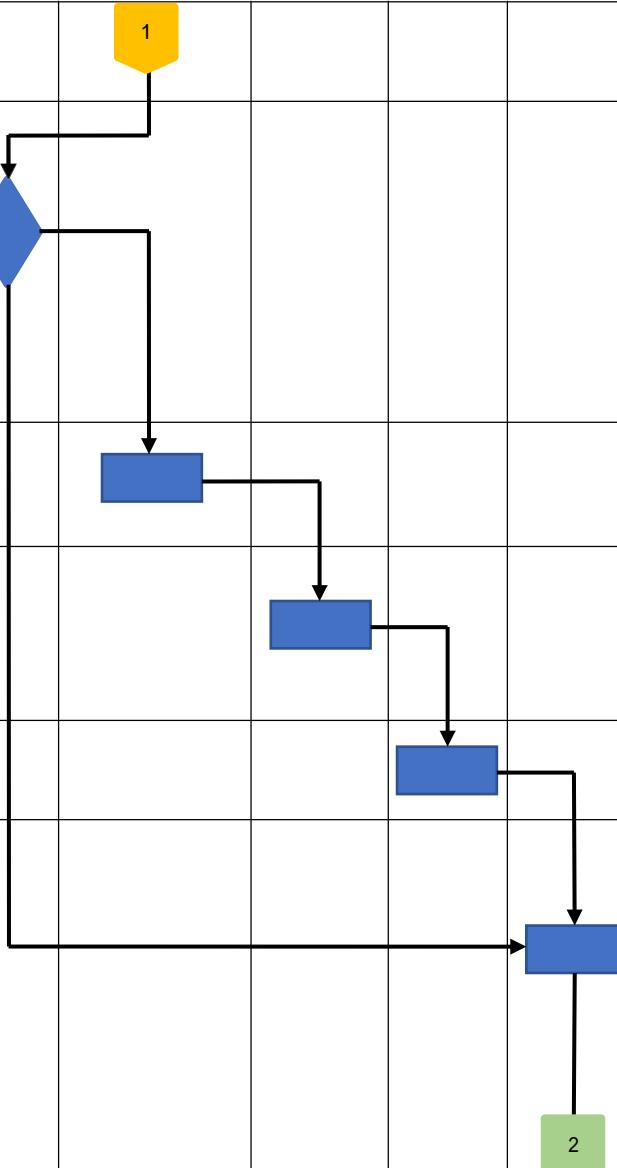
Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	JANUARI 2025
Tanggal Revisi	JANUARI 2025
Tanggal Efektif	JANUARI 2025
Disahkan Oleh	KABIDHUMAS SULAWESI SELATAN  DIDIK SUPRANOTO, S.I.K., M.H. KOMBESPOL NRP 72070705
Nama SOP	Press Release Giat Humas

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.	- Dapat mengoperasikan komputer - Memiliki kemampuan menulis - Dapat berkerjasama sebagai tim - Memiliki pengetahuan mengenai HUMAS POLRI : Visi, Misi, Struktur Organisasi, Tugas Fungsi, dll
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1994 tentang Pers.	
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	
4. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.	
Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.	
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. Media Cetak dan Elektronik di Daerah Sulse 2. Saran Rekomendasi/Pertimbangan dari Polres / Tabes 3. Rekomendasi /Hasil Pemeriksaan (Tes) dari Fungsi Kepolisian Lainnya.	- Lembar Disposisi - Alat Tulis Kantor - Komputer & Printer - Akses Internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan :
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka kegiatan Press Release HUMAS POLRI menjadi tidak maksimal	Di data Bidhumas dan Dokumentasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PRESS RELEASE BIDHUMAS POLDA SULSEL

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			KET
		KAUR PENUM	PAUR BERITA/OPINEV	PAMIN SUBBAG BERITA/ PAMIN SUBBAG OPINEV	SATKER TERKAIT	KAURMIN	KAUR DOKLIPUT	PELIPUT SUBBID PID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Kaur Penum mempertimbangkan nilai publikasi kegiatan dan memberikan pengarahan kepada Pamin Berita/Opinev untuk membuat konsep Press Release.								Lembar disposisi	15 menit	Disposisi	
2.	Paar Penum Berita/Opinev memberikan pengarahan kepada Pamin Subbag Berita/ Pamin Subbag OPINEV membuat konsep Press Release, berkoordinasi dengan satuan kerja terkait, membuat surat undangan peliputan kepada media.								Lembar disposisi	15 menit	Disposisi	
3.	Membuat konsep Press Release dan berkoordinasi dengan satuan kerja terkait serta membuat konsep surat undangan.								- ATK - Data dari satuan kerja terkait (kronologi kasus, tema kegiatan, dsb)	120 menit	- Konsep Press Release - Konsep surat undangan peliputan	
4.	Memeriksa konsep Press Release kemudian jika setuju diserahkan kepada Kaur Penum. Jika tidak setuju mengembalikan ke Pamin Subbag Berita/ Pamin Subbag Opinev								- Konsep Press Release - Konsep surat undangan peliputan kepada media	15 menit	Konsep diperiksa Kaur Penum	

	dengan memberikan masukan apa yang harus diperbaiki.		1									
5.	Memeriksa konsep Press Release kemudian jika setuju diserahkan kepada Kasubbid dengan memberikan masukan apa yang harus diperbaiki.								Konsep Press Release yang telah diperiksa Kasubbid Penmas	15 menit	- Konsep Press Release disetujui oleh Kaur Penum - Konsep surat undangan peliputan diperiksa dan ditandatangani oleh Kaurpenum	
6.	Memberikan konsep Press Release kepada Pamin Subbid								Konsep Press Release yang telah disetujui Kasubbidpenmas	5 menit	Konsep Press Release	
7.	Memberikan konsep Press Release kepada satker terkait.								- Konsep Press Release - Surat undangan media yang telah di ttd Kaurpenum	10 menit	Konsep Press Release siap dibagikan	
8.	Menerima konsep Press Release.									10 menit	Satker menerima konsep Press Release	
9.	Menerima surat undangan peliputan yang telah ditanda tangani oleh Kasubbid Penmas dan Kasubbid PID untuk, memberi nomor dan tanggal serta mendokumentasikannya dan menyerahkannya kepada Pamin Subbag Berita/ Pamin Subbag Opinev.								Konsep surat undangan peliputan telah diperiksa dan ditandatangani oleh Kaurpenum	10 menit	Surat undangan telah didokumentasikan	



10.	Mendistribusikan surat undangan melalui email/fax/media sosial (Whatsapp) dan melakukan koordinasi dengan media yang diundang serta menginformasikan kepada Kaurpenum mengenai jadwal giat Press Release.						2			Undangan Media Massa	60 menit	Daftar kehadiran media	
11.	Mempersiapkan tempat, latar Press Release dan menginformasikan kepada Kasubbid bahwa tempat rilis sudah siap.									Backdrop pameran/display barang bukti, kursi, meja, atk, sound system, pembatas/line barrier kamera, video	60 menit	Tempat Press Release dapat digunakan. Siap melakukan peliputan kegiatan Press Release	
12.	Mempersiapkan APD (Alat Pelindung Diri).									- Helm proyek - Sarung tangan latex - Kaca mata - Masker - Disesuaikan dengan situasi TKP/tempat Press Release	10 menit	Tempat Press Release dapat digunakan. Siap melakukan peliputan kegiatan Press Release	
13.	Mempersiapkan perlengkapan asas praduga tak bersalah (jika pelaku dibawah umur harus memperhatikan UU perlindungan anak).									- Penutup wajah (jika tidak ada balik kanan) - Jika pelaku dibawah umur dilarang expose	10 menit	Tempat Press Release dapat digunakan. Siap melakukan peliputan kegiatan Press Release	
14.	Menerima laporan lalu menginformasikan ke Kaur Penum.							3		Tempat rilis siap	5 menit	Tempat rilis siap	

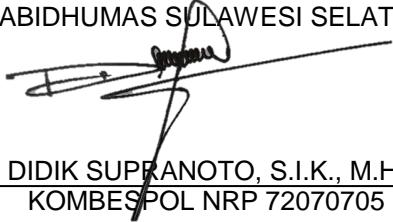
15.	Melaksanakan <i>Press Release.</i>			3						- ATK - <i>Press Release</i>	60 menit	Konferensi Pres		
		TOTAL												7 Jam

Mengetahui, Januari 2025
 KABIDHUMAS POLD A SULAWESI SELATAN


DIDIK SUPRANOTO, S.I.K., M.H.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 72070705



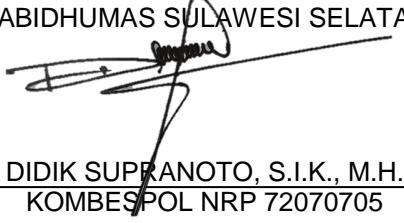
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT
SUBBID PENMAS

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	03 JANUARI 2025
Tanggal Revisi	04 JANUARI 2025
Tanggal Efektif	05 JANUARI 2025
Disahkan Oleh	KABIDHUMAS SULAWESI SELATAN  DIDIK SUPRANOTO, S.I.K., M.H. KOMBESPOL NRP 72070705
Nama SOP	Giat Penerangan Satuan

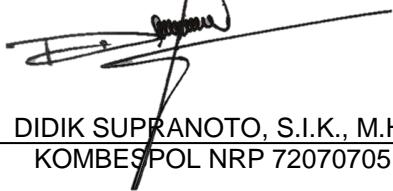
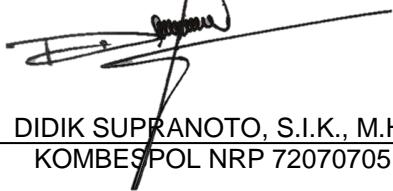
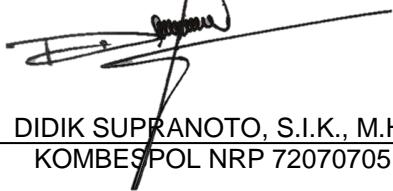
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.	- Dapat mengoperasikan komputer - Memiliki kemampuan menulis - Dapat berkerjasama sebagai tim - Memiliki pengetahuan mengenai HUMAS POLRI : Visi, Misi, Struktur Organisasi, Tugas Fungsi, dll
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1994 tentang Pers.	
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	
4. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.	
Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.	
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. Media Cetak dan Elektronik di Daerah Sulse 2. Saran Rekomendasi/Pertimbangan dari Polres / Tabes	- Lembar Disposisi - Alat Tulis Kantor - Komputer & Printer - Akses Internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan :
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka kegiatan Penerangan Satuan Bidhumas POLRI menjadi tidak maksimal	Di data Bidhumas dan Dokumentasi



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT
SUBBID PENMAS

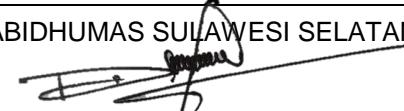
Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	03 JANUARI 2025
Tanggal Revisi	04 JANUARI 2025
Tanggal Efektif	05 JANUARI 2025
Disahkan Oleh	<p>KABIDHUMAS SULAWESI SELATAN</p>  <p>DIDIK SUPRANOTO, S.I.K., M.H. KOMBESPOL NRP 72070705</p>
Nama SOP	Giat Penerbitan Leaflet

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.	<ul style="list-style-type: none">- Dapat mengoperasikan computer- Memiliki kemampuan menulis- Dapat berkerjasama sebagai tim- Memiliki pengetahuan mengenai HUMAS POLRI : Visi, Misi, Struktur Organisasi, Tugas Fungsi, dll
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1994 tentang Pers.	
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	
4. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.	
Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.	
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. Media Cetak dan Elektronik di Daerah Sulse	<ul style="list-style-type: none">- Lembar Disposisi- Alat Tulis Kantor- Komputer & Printer- Akses Internet
2. Saran Rekomendasi/Pertimbangan dari Polres / Tabes	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan :
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka kegiatan Penerbitan Leaflet Bidhumas POLRI menjadi tidak maksimal	Di data Bidhumas dan Dokumentasi

 <p>KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SULAWESI SELATAN BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT SUBBID PENMAS</p>	<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP</td><td></td></tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td><td>JANUARI 2025</td></tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td><td>JANUARI 2025</td></tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td><td>JANUARI 2025</td></tr> <tr> <td>Disahkan Oleh</td><td> <p>KABIDHUMAS SULAWESI SELATAN</p>  <p>DIDIK SUPRANOTO, S.I.K., M.H. KOMBESPOL NRP 72070705</p> </td></tr> <tr> <td>Nama SOP</td><td>Giat Klipping SKH</td></tr> </table>	Nomor SOP		Tanggal Pembuatan	JANUARI 2025	Tanggal Revisi	JANUARI 2025	Tanggal Efektif	JANUARI 2025	Disahkan Oleh	<p>KABIDHUMAS SULAWESI SELATAN</p>  <p>DIDIK SUPRANOTO, S.I.K., M.H. KOMBESPOL NRP 72070705</p>	Nama SOP	Giat Klipping SKH
Nomor SOP													
Tanggal Pembuatan	JANUARI 2025												
Tanggal Revisi	JANUARI 2025												
Tanggal Efektif	JANUARI 2025												
Disahkan Oleh	<p>KABIDHUMAS SULAWESI SELATAN</p>  <p>DIDIK SUPRANOTO, S.I.K., M.H. KOMBESPOL NRP 72070705</p>												
Nama SOP	Giat Klipping SKH												
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan												
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1994 tentang Pers. 3. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 4. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> - Dapat mengoperasikan computer - Memiliki kemampuan menulis - Dapat berkerjasama sebagai tim - Memiliki pengetahuan mengenai HUMAS POLRI : Visi, Misi, Struktur Organisasi, Tugas Fungsi, dll 												
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan												
1. Media Cetak dan Elektronik di Daerah Sulsel 2. Saran Rekomendasi/Pertimbangan dari Polres / Tabes	<ul style="list-style-type: none"> - Lembar Disposisi - Alat Tulis Kantor - Komputer & Printer - Akses Internet 												
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan :												
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka kegiatan Klipping SKH Bidhumas POLRI menjadi tidak maksimal	Di data Bidhumas dan Dokumentasi												



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT
SUBBID PENMAS

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	03 JANUARI 2025
Tanggal Revisi	04 JANUARI 2025
Tanggal Efektif	05 JANUARI 2025
Disahkan Oleh	KABIDHUMAS SULAWESI SELATAN  DIDIK SUPRANOTO, S.I.K., M.H. KOMBESPOL NRP 72070705
Nama SOP	Giat Penerbitan Majalah Tribrrata News

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.	- Dapat mengoperasikan computer - Memiliki kemampuan menulis - Dapat berkerjasama sebagai tim - Memiliki pengetahuan mengenai HUMAS POLRI : Visi, Misi, Struktur Organisasi, Tugas Fungsi, dll
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1994 tentang Pers.	
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	
4. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.	
Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.	
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. Media Cetak dan Elektronik di Daerah Sulsel 2. Saran Rekomendasi/Pertimbangan dari Polres / Tabes	- Lembar Disposisi - Alat Tulis Kantor - Komputer & Printer - Akses Internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan :
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka kegiatan Penerbitan Majalah Tribrrata News Bidhumas Polda Sulsel menjadi tidak maksimal	Di data Bidhumas dan Dokumentasi



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT
SUBBID PENMAS

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	JANUARI 2025
Tanggal Revisi	JANUARI 2025
Tanggal Efektif	JANUARI 2025
Disahkan Oleh	KABIDHUMAS SULAWESI SELATAN  DIDIK SUPRANOTO, S.I.K., M.H. KOMBESPOL NRP 72070705
Nama SOP	Pelaksanaan Giat Kerjasama (Kemitraan)

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.	- Dapat mengoperasikan komputer - Memiliki kemampuan menulis - Dapat berkerjasama sebagai tim - Memiliki pengetahuan mengenai HUMAS POLRI : Visi, Misi, Struktur Organisasi, Tugas Fungsi, dll
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1994 tentang Pers.	
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	
4. Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.	
Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik.	
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. Media Cetak dan Elektronik di Daerah Sulse 2. Saran Rekomendasi/Pertimbangan dari Polres / Tabes 3. Rekomendasi /Hasil Pemeriksaan (Tes) dari Fungsi Kepolisian Lainnya.	- Lembar Disposisi - Alat Tulis Kantor - Komputer & Printer - Akses Internet
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan :
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka kegiatan Kerjasama (Kemitraan) BIDHUMAS POLDAM SULSEL menjadi tidak maksimal	

